The cover features a white background with a large, bold, black diagonal line running from the top-left towards the bottom-right. In the top-left corner, there are overlapping geometric shapes in black and brown. In the top-right corner, there is a solid brown circle. The bottom half of the cover shows a blurred image of several books with light-colored covers resting on a wooden surface. The text is centered and reads:

**RANCANGAN  
RENCANA STRATEGI  
(RENSTRA)  
TAHUN 2021-2026**

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Kantor Kesbangpol dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga RENSTRA Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021–2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Bulukumba yang kita cintai.

Bulukumba,

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bulukumba

**AHMAD ARFAN, S.IP, MT**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19721212 199202 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	10
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	10
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3.1. Pelayanan Rekomendasi Penelitian.....	15
2.3.2. Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik .....	15
2.3.3. Capaian Kinerja Pelayanan .....	15
2.4. Kekuatan dan Kelemahan .....	16
2.4.1 Kekuatan.....	16
2.4.2 Kelemahan.....	16
2.5. Peluang dan Tantangan .....	16
2.5.1 Peluang .....	16
2.5.2 Tantangan.....	17
2.5.3 Faktor Kunci Keberhasilan .....	17
2.5.4 Analisis SWOT .....	18
2.6. Capaian Kinerja Pendanaan.....	20

2.7	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
3.2.	Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	31
3.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	32
3.4.	Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	50
BAB VIII	PENUTUP .....	53
8.1.	Kesimpulan .....	53
8.2.	Kaidah Pelaksanaan .....	54





# PENDAHULUAN

*Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Rancangan Awal Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba.*

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sejalan dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode tahun 2021-2025 maka dilakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga harus memulai melakukan proses penyusunan Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta tugas pokok dan fungsi tiap perangkat daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun

tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Penyusunan Renstra pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bahwa Rencana Strategis OPD merupakan rencana



pembangunan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra PD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016- 2020 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
  13. Kesepakatan Mendagri dan Kapolri Nomor 119 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Kamtibmas;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa

dan politik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2021-2026

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Kesbangpol dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kesbangpol;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kesbangpol;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kesbangpol di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesbangpol, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah*

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan Rincian Tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi :

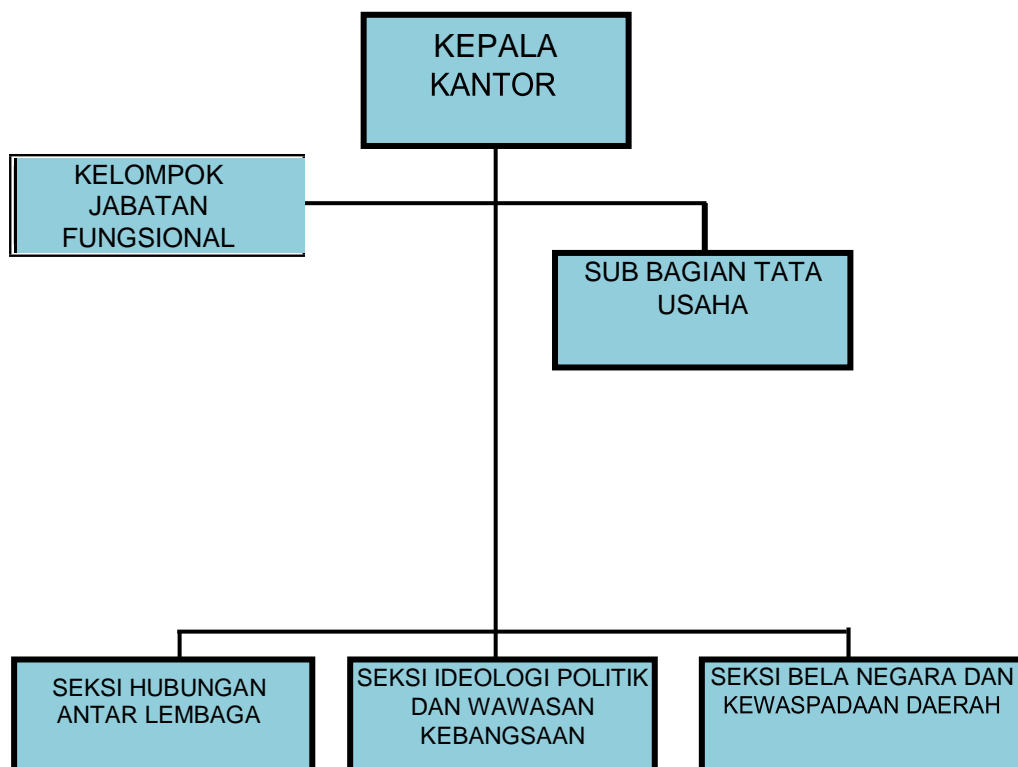
- a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- b. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;

- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan bela negara ;
- f. Pelaksanaan pemberian penghargaan kebangsaan dilingkungan pemerintah kabupaten ;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat kecamatan, kelurahan /desa dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara;
- h. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat dibidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan dilingkungan pemerintah kabupaten ;
- i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur kebangsaan dan politik dibidang ketahanan ideologi negara ;

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peraturan Bupati No. .... Tahun .....

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Agustus 2020, jumlah pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 16 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 9 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 3 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi PNS Kesbangpol Kab. Bulukumba  
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Kepala Kantor	1	0	1
2.	Kepal Sub Bagian Tata Usaha	0	1	1
2.	Seksi Bela Negara dan Kewaspadaan Daerah	1	0	1
3.	Seksi Idelogi Politik dan Wawasan Kebangsaan	1	0	1
4.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	1	0	1
5.	Staf	6	5	11
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>16</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 16 orang PNS dilingkungan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba, 9 orang ( 56,25 %) adalah laki-laki dan 6 orang (37,5%) adalah perempuan.



Tabel 2.2  
Komposisi PNS Kantor Kesbangpol  
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	Kepala Kantor	0	0	0	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	0	1	0
3.	Seksi Bela Negara dan Kewaspadaan Daerah	0	0	1	0
4.	Seksi Idelogi Politik dan Wawasan Kebangsaan	0	0	1	0
5.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	0	0	1	0
6.	Staf	0	4	7	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 11 orang atau 68,75%, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 5 orang atau 31,25%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3  
Komposisi PNS Kantor Kesbangpol Kab. Bulukumba  
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	Kepala Kantor	0	1	0
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	0	1
3.	Seksi Bela Negara dan Kewaspadaan Daerah	0	0	1
4.	Seksi Idelogi Politik dan Wawasan Kebangsaan	0	0	1
5.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	0	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari jumlah tersebut 5 jabatan ada pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.4  
Komposisi PNS Kantor Kesbangpol Kab. Bulukumba  
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	Kepala Kantor	1	0	0	0	0
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	1	0	0	0
3.	Seksi Bela Negara dan Kewaspadaan Daerah	0	1	0	0	0
4.	Seksi Ideologi Politik dan Wawasan Kebangsaan	1	0	0	0	0
5.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	0	1	0	0	0
6.	Staf	0	6	0	5	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 11 orang atau sebesar 68,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.5  
Daftar asset yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bulukumba

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Pompa Air	1	1			
2	Mobil Dinas Operasional	1	1			
3	Sepeda Motor	2	2			
4	Mesin Ketik manual standard	1	1			
5	Mesin Ketik lainnya	1	1			
6	Lemari Besi/Metal	1	1			
7	Lemari Kayu	1	1			
8	Lemari Kaca	2	2			
9	Mesin Absensi	1	1			
10	LCD Projector/Infocus	3	3			
11	Alat Kantor Lainnya (Flashdisk)	1	1			
12	Alat Kantor Lainnya(Pengaman Jendela)	1	1			
13	Meja Kerja Kayu	1	1			
14	Kursi Rapat	1	1			
15	Kursi Tamu	1	1			
16	Kursi Putar	1	1			
17	Lemari Es	1	1			
18	AC Split	4	4			
19	Kipas Angin	3	3			
20	Televisi	1	1			
21	Camera Video	2	2			
22	Alat Pemanas Ruangan	1	1			
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1			
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1			
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	3	1		
26	Kursi Pejabat lainnya	16	16			
27	Buffet Kaca	1	1			
28	Power Supply Microphone	1	1			
29	Camera Elektronik	1	1			
30	Intermediate Telephone/Key telephone	1	1			
31	Handy Talkie	2	2			
32	Alat peraga kejuruan lainnya	1	1			
33	PC Unit	4	4			
34	Laptop	10	10			
35	Notebook	1	1			
36	Monitor	1	1			

37	Printer	13	13			
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	1			
40	Pagar Permanen	1	1			
41	Sumur dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	1			
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>	<b>93</b>	<b>1</b>		

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukuma, Tahun 2020.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 94 asset di lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 93 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 98,93 %. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 1 atau sebesar 1,06 %. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat tidak ada. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

### **2.3.1 Pelayanan Rekomendasi Penelitian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian serta Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas untuk memberikan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Bulukumba.

### **2.3.2 Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Partai Politik di Kabupaten Bulukumba.

### **2.3.3 Capaian Kinerja Pelayanan**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada Pemohon Rekomendasi Penelitian dan Pengurus Partai Politik/LSM/Ormas dan Yayasan, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar pemohon Rekomendasi Penelitian dan Pengurus Partai Politik/LSM/Ormas dan Yayasan semakin sadar untuk melaksanakan kewajibannya dan semakin mudah untuk melakukan pengurusan

Rekomendasi Penelitian dan Surat Keterangan Terdaftar bagi Pengurus Partai Politik/LSM/Ormas dan Yayasan.

## **2.4 Kekuatan dan Kelemahan**

### **2.4.1 Kekuatan.**

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (*Strength*) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Adanya tupoksi/kewenangan;
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- d. Tersedianya anggaran.

### **2.4.2 Kelemahan**

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan Kelemahan (*Weakness*) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia;
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang;
- c. Anggaran yang tersedia sangat tidak memadai.

## **2.5 Peluang dan Tantangan**

### **2.5.1 Peluang**

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (*Opportunities*) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi;
- b. Adanya dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Adanya dukungan regulasi terhadap kewenangan Kesbangpol;
- d. Dukungan kemitraan/kerjasama dengan instansi vertikal.

**252. Tantangan**

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan (*Threats*) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai idiologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengamanan lingkungan dalam kehidupan inter dan antar umat beragama.

**253. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang terpilih antara lain sebagai berikut :

- a. Optimalkan sarana dan prasarana pendukung keberhasilan pencapaian tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Optimalkan tingkat partisipasi masyarakat mendorong tersedianya data dan informasi organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik;
- c. Optimalkan tingkat kemitraan/kerjasama dengan instansi vertical dalam menyikapi perkembangan organisasi kemasyarakatan dan politik serta melakukan deteksi dan tangkal terhadap konflik social yang akan terjadi;
- d. Optimalkan sumber daya anggaran dan manusia dalam mensosialisasikan produk-produk hukum tentang organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik serta pemahaman nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Optimalkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kerukunan hidup inter dan antar umat agama.

## 254. Analisis SWOT

Tabel : 2.4 Identifikasi Lingkungan Strategis

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Tupoksi/Kewenangan</li> <li>b. Tersedianya Sumber Daya Manusia</li> <li>c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran</li> <li>d. Tersedianya anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia</li> <li>b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang</li> <li>c. Anggaran yang tersedia sangat tidak memadai</li> </ul>
<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi</li> <li>b. Adanya dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>c. Adanya dukungan regulasi terhadap kewenangan Kesbangpol</li> <li>d. Dukungan kemitraan/ kerjasama dengan instansi vertikal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai idiologi dan wawasan kebangsaan</li> <li>b. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengamanan lingkungan dalam kehidupan inter dan antar umat beragama</li> </ul>

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat (kali/tahun)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0	100%	100%	100%	80%	0%

## 2.6 Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

### a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp 4.985.418.952 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 93,64 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp 5.323.941.159 (lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	934.685.548,00	907.824.594,00	97,12
2	2017	898.804.367,00	899.007.089,00	100,02
3	2018	909.562.421,00	908.092.961,00	99,84
4	2019	1.333.521.105,00	1.297.847.746,00	97,32
5	2020	1.247.367.718,00	972.646.562,00	77,97
<b>Jumlah</b>		<b>5.323.941.159,00</b>	<b>4.985.418.952,00</b>	<b>93,64</b>

Tabel 2.7  
Target dan Realisasi Belanja Langsung  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	1.146.561.000,00	1.107.774.757,00	96,62
2	2017	1.100.000.000,00	1.096.936.550,00	99,72
3	2018	1.044.906.310,00	903.843.973,00	86,50
4	2019	754.161.101,00	698.987.396,00	92,68
5	2020	692.945.500,00	678.716.776,00	97,94
<b>Jumlah</b>		<b>4.738.573.911,00</b>	<b>4.486.259.452,00</b>	<b>94,67</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.252.314.459,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp. 1.894.335.680,8 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh koma delapan rupiah) atau sejumlah Rp 9.471.678.404,00 (Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.8  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba  
 Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>934.685</b>	<b>898.804</b>	<b>909.562</b>	<b>1.333.521</b>	<b>1.247.367</b>	<b>907.824</b>	<b>899.007</b>	<b>908.092</b>	<b>1.297.874</b>	<b>972.646</b>	<b>97,12</b>	<b>100,02</b>	<b>99,84</b>	<b>97,32</b>	<b>77,97</b>
	Belanja Pegawai	934.685	898.804	909.562	1.333.521	1.247.367	907.824	899.007	909.562	1.297.874	972.646	97,12	100,02	99,84	97,32	77,97
	a. Gaji dan Tunjangan	934.685	898.804	909.562	987.406	1.000.063	907.824	899.007	909.562	1.297.874	840.689	97,12	100,02	99,84	97,32	84,06
	b. Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00	346.115	247.304	0,00	0,00	0,00	346.115	131.957	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
	c. Insentif Pungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.146.561</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1044.906</b>	<b>754.161</b>	<b>692.945</b>	<b>1.107.774</b>	<b>1.096.936</b>	<b>903.843</b>	<b>698.987</b>	<b>668.710</b>	<b>96,62</b>	<b>99,72</b>	<b>86,50</b>	<b>92,68</b>	<b>96,50</b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>436.934</b>	<b>433.636</b>	<b>452.120</b>	<b>280.339</b>	<b>312.069</b>	<b>430.441</b>	<b>432.636</b>	<b>432.131</b>	<b>277.772</b>	<b>213.558</b>	<b>98,51</b>	<b>99,77</b>	<b>95,58</b>	<b>99,08</b>	<b>68,43</b>
(1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	675	675	675	0,00	0,00	675	675	675	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
(2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.900	13.692	18.680	16.800	16.800	17.251	13.692	14.948	14.966	14.368	82,54	100,00	80,02	88,56	85,52
(3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.020	1.010	1.300	1.300	1.044	898	1.010	1.105	1.068	1.016	88,00	100,00	85,07	82,23	97,31
(4)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	110.541	147.554	137.320	2.402	28.489	108.820	147.554	137.134	2.402	27.759	98,44	100,00	99,86	100,00	97,43
(5)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000	12.000	12.000	12.000	18.000	9.000	12.000	12.000	12.000	18.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
(6)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.157	834	834	1.770	1.770	1.157	834	834	1.770	1.770	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
(7)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.727	1.270	1.270	3.110	3.429	1.727	1.270	1.270	3.110	3.429	99,99	100,00	99,92	100,00	100,00
(8)	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	206.005	183.472	202.844	139.891	52.993	205.005	182.472	186.969	139.891	52.969	99,51	99,45	92,17	99,71	99,95
(9)	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	85.906	73.126	77.195	102.965	94.366	85.906	73.126	77.193	102.965	94.247	99,99	100,00	100,00	100,00	99,87
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>18.160</b>	<b>70.005</b>	<b>30.544</b>	<b>40.079</b>	<b>87.179</b>	<b>18.160</b>	<b>70.005</b>	<b>30.452</b>	<b>40.079</b>	<b>87.179</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
(1)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	13.250	3.655	0,00	7.000	0,00	13.250	3.655	0,00	7.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(2)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	18.211	4.700	17.592	49.500	0,00	18.211	4.700	17.592	49.500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
(3)	Pengadaan Mebeleur	0,00	20.518	3.000	0,00	10.550	0,00	20.518	3.000	0,00	10.550	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
(4)	Pengadaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	3.200	15.912	15.379	0,00	0,00	3.200	15.912	15.379	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
(5)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.160	2.900	4.000	6.575	4.750	5.160	2.900	4.000	6.575	4.750	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
(6)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12.988	15.126	11.989	0,00	0,00	12.987	15.126	11.897	0,00	0,00	100,00	100,00	99,23	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>62.580</b>	<b>54.928</b>	<b>43.293</b>	<b>16.098</b>	<b>0,00</b>	<b>58.275</b>	<b>54.928</b>	<b>43.293</b>	<b>16.074</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(1)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.580	54.928	43.293	16.098	0,00	58.275	54.928	43.293	16.074	0,00	93,12	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.098</b>	<b>24.930</b>	<b>1.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.074</b>	<b>24.692</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>99,04</b>
(2)	Penyusunan Program Kerja SKPD	0,00	0,00	0,00	16.098	24.930	0,00	0,00	0,00	16.074	24.692	0,00	0,00	0,00	99,85	99,04
<b>4.</b>	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>109.710</b>	<b>199.169</b>	<b>138.280</b>	<b>82.844</b>	<b>65.708</b>	<b>109.692</b>	<b>198.469</b>	<b>103.608</b>	<b>79.500</b>	<b>65.699</b>	<b>99,98</b>	<b>99,65</b>	<b>74,93</b>	<b>95,96</b>	<b>99,98</b>
(1)	Pengendalian Keamanan Lingkungan	20.520	88.240	63.280	53.254	30.801	20.520	88.240	47.358	49.995	30.792	100,00	100,00	74,84	93,88	99,97
(2)	Operasi Pengamanan dan Ketertiban Umum	124.367	110.929	75.000	29.590	34.560	114.762	110.229	56.250	29.505	34.560	92,28	99,37	75,00	99,71	100,00
(3)	Pemberantasan dan pencegahan narkoba	0,00	0,00	0,00	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>62.305</b>	<b>97.825</b>	<b>53.660</b>	<b>41.840</b>	<b>51.014</b>	<b>61.510</b>	<b>96.468</b>	<b>28.820</b>	<b>35.820</b>	<b>45.996</b>	<b>98,72</b>	<b>98,61</b>	<b>53,71</b>	<b>85,61</b>	<b>90,16</b>
(1)	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	12.225	37.850	25.000	21.200	29.290	11.830	36.822	11.900	18.100	29.290	96,53	97,29	47,60	85,38	100,00
(2)	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	17.160	28.040	28.660	19.840	10.510	17.160	27.710	16.920	16.920	8.550	95,02	98,82	59,04	85,28	81,35
(4)	Pengembangan Sistem Aplikasi Database Organisasi Masyarakat	32.920	31.935	0,00	800	11.214	32.520	31.935	0,00	800	8.156	98,78	100,00	0,00	100,00	72,73

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>5.</b>	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>31.816</b>	<b>27.521</b>	<b>27.521</b>	<b>17.530</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816</b>	<b>27.521</b>	<b>27.171</b>	<b>13.070</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>	<b>100,00</b>	<b>98,73</b>	<b>74,56</b>	<b>0,00</b>
(1)	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	31.816	27.521	27.521	17.530	0,00	31.816	27.521	27.171	13.070	0,00	94,19	100,00	98,73	74,56	0,00
<b>6.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>96.669</b>	<b>38.070</b>	<b>54.800</b>	<b>65.041</b>	<b>32.812</b>	<b>85.255</b>	<b>38.070</b>	<b>35.330</b>	<b>63.124</b>	<b>31.142</b>	<b>88,19</b>	<b>100,00</b>	<b>64,47</b>	<b>97,05</b>	<b>94,91</b>
(1)	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	96.669	38.070	54.800	65.041	32.812	85.255	38.070	35.330	63.124	31.142	88,19	100,00	64,47	97,05	94,91
<b>7.</b>	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>171.351</b>	<b>163.542</b>	<b>134.687</b>	<b>69.382</b>	<b>112.558</b>	<b>169.309</b>	<b>163.536</b>	<b>110.916</b>	<b>62.565</b>	<b>111.122</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,35</b>	<b>90,17</b>	<b>98,72</b>
(1)	Penyuluhan kepada masyarakat	83.499	83.049	70.000	41.522	0,00	83.399	83.049	61.960	37.802	0,00	100,00	100,00	88,51	91,04	0,00
(2)	Koordinasi forum-forum diskusi politik	36.857	39.982	28.655	12.929	0,00	36.857	39.982	28.655	10.144	0,00	100,00	100,00	100,00	78,46	0,00
(3)	Penyusunan database partai politik	41.264	30.824	25.000	4.999	9.627	39.272	30.824	17.850	4.999	9.497	95,00	100,00	71,40	100,00	98,64
(4)	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	9.781	9.687	11.032	9.931	2.931	9.781	9.687	2.451	9.619	2.545	91,00	100,00	22,22	96,86	96,83
(5)	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.080	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
<b>8.</b>	<b>Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu</b>	<b>19.604</b>	<b>15.300</b>	<b>110.000</b>	<b>141.005</b>	<b>91.848</b>	<b>19.604</b>	<b>15.300</b>	<b>92.121</b>	<b>110.980</b>	<b>89.322</b>	<b>95,66</b>	<b>100,00</b>	<b>83,75</b>	<b>78,71</b>	<b>97,24</b>
(1)	Desk Pemilu	19.604	15.300	110.000	141.005	91.848	19.604	15.300	92.121	110.980	89.322	95,66	100,00	83,75	78,71	97,24
<b>TOTAL</b>		<b>2.081.246</b>	<b>1.998.804</b>	<b>1.954.468</b>	<b>2.087.682</b>	<b>1.940.313</b>	<b>2.015.599</b>	<b>1.995.943</b>	<b>1.811.936</b>	<b>1.996.835</b>	<b>1.641.356</b>	<b>96,85</b>	<b>99,86</b>	<b>96,13</b>	<b>95,65</b>	<b>96,34</b>

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016 s/d 2020.

1. Sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kegiatan, terdapat kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, hanya beberapa kali dalam 5 (lima) tahun, dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rangkaian untuk meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat dan Peningkatan Kewaspadaan Dini masyarakat.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

## **2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba sebagai perumus kebijakan di bidang :

- a. Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- c. Kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan pelayanan menghadapi beberapa tantangan dan peluang, yaitu:

- a. Memudarnya ideologi dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda terutama di kalangan pelajar;
- b. Meningkatkan diseminasi wawasan kebangsaan dan ideologi guna menanamkan dan meningkatkan pemahaman ideologi dan pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda.
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik dan etika politik yang tentunya dapat memengaruhi stabilitas politik di Kabupaten Bulukumba.
- d. Diseminasi tentang Etika Moral dan Re-orientasi Politik bagi masyarakat; ormas/LSM, tokoh wanita, dan tokoh masyarakat.

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan.



Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah seperti tertuang dalam tabel 2.10 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.9  
**Target Capaian Indikator Renstra  
 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
 Bulukumba Tahun 2022-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi yang terjadi	15%	60%	70%	75%	80%	85%
2	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di Daerah	0	16%	17%	18%	19%	20%

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

*Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah*

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Pembinaan Politik dan Kewaspadaan Dini Daerah. Sedangkan secara Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai perumus kebijakan di bidang:

- a. Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing;
- c. Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang

dipilah menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 3.1  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
Dalam Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Adanya kasus intoleransi yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Penolakan Masyarakat setempat terhadap aktivitas dan keberadaan tempat ibadah Umat Katolik di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo</li> <li>• Konflik berlatar belakang isu SARA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan nilai dan norma masyarakat dan masih adanya pengangguran/ kemiskinan</li> <li>• Bahaya laten paham ideologi radikal yang hampir tak terdeteksi</li> <li>• Isu SARA</li> </ul>
Adanya Kasus Kekerasan dan Radikalisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih seringnya terjadi aksi unjuk rasa dengan kekerasan</li> <li>• Masih maraknya aksi begal di beberapa kawasan Kab. Bulukumba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya akan kekerasan dan radikalisme</li> </ul>

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan politik adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bulukumba adalah melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan poltik dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba tidak berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Seperti halnya dengan Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulukumba, begitu pula dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba tidak berkaitan langsung

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Seperti diketahui bahwa isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Pengembangan sistem informasi
2. Penanggulangan banjir, rob dan genangan
3. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pengendalian pemanfaatan ruang
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
6. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7. Penguatan Ketahanan Pangan

8. Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan
10. Peningkatan Iklim Investasi dan ekonomi daerah
11. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12. Peningkatan Moral dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
13. Pengendalian Kependudukan yang lebih serasi dan berimbang

Penentuan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu-isu strategis daerah *Peningkatan Ketentraman dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan* antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
2. Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya
3. Peningkatan Kewaspadaan Daerah Dan Penanganan Konflik Sosial
4. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Dan Kehidupan Demokrasi
5. Pembinaan Dan Pemberdayaan Peran Organisasi Kemasyarakatan

## TUJUAN DAN SASARAN

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah*

---

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Tujuan strategis itu sendiri merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Selanjutnya, dalam perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misinya telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Kabupaten Bulukumba. Untuk itu, agar dapat



terukur keberhasilan di dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud.

a. Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama;
2. Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

b. Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama;
2. Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	70	70,5	71,0	71,5	72,0	100
				2. Konflik Antar Umat Beragama	2	1	1	1	1	1
Misi 12 : Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Terbentuknya Tim Penanganan Konflik Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya Hubungan kemitraan antar Institusi	1. Indeks Rasa Aman	15	15	15	15	15	15
				2. Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	6	6	6	7	8	8

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Kesbangpol	51	52	53	65	68	70	72	72

#### 4.1. Nilai

Nilai yang dianut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan sebagai norma dalam kehidupan seluruh anggotanya dalam melakukan tugas masing-masing dalam rangka mencapai Tujuannya adalah :

##### 1. Responsif

Adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

##### 2. Akuntabel

Adalah setiap kegiatan dan hasil akhir yang tertuang dalam program dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### 3. Partisipatif

Adalah merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan daerah untuk menciptakan kondisi kesatuan bangsa yang kondusif.

##### 4. Inisiatif

Adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara, dengan tetap memperhatikan perikehidupan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### 5. Harmonis

Adalah suasana yang tertib, teratur, aman dan damai serta terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama, dengan memperhatikan masing-masing unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama, diperlakukan sama (Keselarasan, Keserasian, dan Keseimbangan).

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2021-2026

<b>Visi RPJMD</b>		<b>: “Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”</b>								
<b>Misi ke- 1 RPJMD</b>		<b>: Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat</b>								
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun</b>						
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
1	Meningkatnya Kesadaran Umat Beragama	Terwujudnya partisipasi Tokoh Agama dalam Pembinaan Masyarakat yang lebih religius	Persentase Pembinaan Tokoh Agama di Wilayah (%)	100	100	100	100	100		
<b>Misi Ke- 12 RPJMD : Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan</b>										
1	Angka Konflik Antar Warga	Meningkatkan kondisi lingkungan nyaman dan tertib	Persentase Konflik yang ditangani (%)	100	100	100	100	100		

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah*

---

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesadaran Umat Beragama	Terwujudnya partisipasi tokoh agama dalam pembinaan masyarakat yang lebih religius	Peningkatan pemahaman masyarakat akan penerapan nilai-nilai luhur kebangsaan	1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan, Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan pembinaan pembauran kebangsaan, Penyelenggaraan pembinaan nilai nilai luhur budaya bangsa.
Meningkatkan kondisi lingkungan nyaman dan tertib	Menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan	<p>Peningkatan kewaspadaan masyarakat</p> <p>Peningkatan pemahaman dan Kesadaran berorganisasi Bagi masyarakat</p> <p>Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban</p>	<p>2. Pemantauan orang asing, dan organisasi asing, Penyelenggaraan sosialisasi pencegahan paham radikalisme dan terorisme serta pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat</p> <p>3. Fasilitasi deteksi dan penanganan konflik sosial</p> <p>4. Fasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas bagi organisasi kemasyarakatan, Organisasi politik, dan Lembaga Nirlaba Lainnya</p> <p>5. Peningkatan lingkungan nyaman dan tertib</p>

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan.

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba.

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing-masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 - 2026, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Bulukumba.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, sasaran pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah Terwujudnya partisipasi tokoh agama dalam pembinaan masyarakat yang lebih religius dan Menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan sehingga ada keterkaitan dengan Misi-ke- 1 yakni Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat dan Misi ke- 12 yakni Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

Rincian program dan kegiatan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1  
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan  
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP OPD 2. % ASN Nilai SKP Kategori Baik 3. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	15.942.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu (%) <b>Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi</b>	100%	100 %	330.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang disusun dan ditetapkan	72 Dokumen	72 Dokumen	150.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	27.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Penyusunan RKA Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	27.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	27.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan-SKPD	Jumlah DPA Pokok yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	27.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan</b>					13.337.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan	5 Tahun	5 Tahun	12.500.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	60 Bulan	75.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	60 Bulan	500.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	60 Bulan	60 Bulan	37.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	60 Bulan	60 Bulan	25.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	60 Bulan	60 Bulan	100.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60 Bulan	60 Bulan	50.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 Bulan	60 Bulan	25.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 Bulan	60 Bulan	250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan Jumlah peralatan Rumah Tangga yang tersedia	60 Bulan	60 Bulan	17.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	60 Bulan	60 Bulan	250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	60 Bulan	60 Bulan	60.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu pemda yang difasilitasi	60 Bulan	60 Bulan	250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60 Bulan	60 Bulan	750.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 Bulan	60 Bulan	750.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis arsip dinamis yang dikelola	60 Bulan	60 Bulan	35.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya system pemerintahan berbasis elektronik	60 Bulan	60 Bulan	25.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan</b>			<b>145.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli	8 Unit	8 Unit	0	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli	8 Unit	8 Unit	375.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan Mebel	Jenis dan jumlah mebel yang tersedia	30 Unit	30 Unit	500.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	10 Unit	10 Unit	125.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit aset tak berwujud	1 Unit	1 Unit	50.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	2 Unit	2 Unit	100.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung yang tersedia	2 Unit	2 Unit	50.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia</b>			<b>800.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60 Bulan	60 Bulan	25.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	60 Bulan	60 Bulan	250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Listrik					
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	60 Bulan	60 Bulan	125.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	60 Bulan	400.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Milik Daerah</b>			<b>1.330.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda empat	50 Unit	50 Unit	150.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda dua	15 Unit	15 Unit	37.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	125 Unit	125 Unit	50.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis Aset tak berwujud yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	17.500.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	260.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	125 Unit	125 Unit	75.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Mengikuti Pelatihan Gerakan Bela Negara	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat khususnya Pemuda dalam Mengikuti Pelatihan Gerakan Bela Negara	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	% tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	15		<b>750.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	50 Orang	50 Orang	<b>750.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah laporan Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan				Kesbangpol	Kab.Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jumlah laporan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah Laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah					Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Bulan	60 Bulan	500.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Bulan	60 Bulan	250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum	Meningkatnya Jumlah Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum	Persentase Jumlah Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	% Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu			1.250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi kondisi Politik di kab. Bulukumba			1.250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol				Kesbangpol	Kab.Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Bulan	60 Bulan	1.000.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Bulan	60 Bulan	250.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba	
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Cakupan Jumlah Konflik antar umat beragama dan etnis			675.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan pemetaan potensi kerwananan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis			675.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
					Jumlah Peserta Dialog Publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah				Kesbangpol	Kab.Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jumlah Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	60 Bulan	60 Bulan	550.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	60 Bulan	60 Bulan	125.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	% Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat			<b>625.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah dokumen pemetaan konflik wilayah			<b>625.000.000</b>	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah laporan koordinasi Tiga Pilar Bangdes mantra				Kesbangpol	Kab.Bulukumba



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jumlah laporan pemantauan dan pengendalian trantibmas				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah laporan pemantauan dan pengendalian unjuk rasa				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah objek yang membutuhkan pengamanan				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah laporan Forum kewaspadaan dini daerah Prov. Sul-Sel				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah laporan antisipasi Potensi Ancaman Bangsa				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
				Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	60 Bulan	60 Bulan	500.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan dini,	60 Bulan	60 Bulan	125.000.000	Kesbangpol	Kab.Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah						
<b>Grand Total</b>								<b>19.242.500.000</b>		



## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

***Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.***

---

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan

capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba selama periode rencana.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Bulukumba.

Tabel 7.1  
**Target Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Bulukumba Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	5	5	5	4	0	0

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.1 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 7.2  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten**  
**Bulukumba Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi yang terjadi	50%	15%	60%	70%	75%	80%	85%
2	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di Daerah	14%	0	16%	17%	18%	19%	20%

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan*

---

### 8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kantor Kesbangpol sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kantor Kesbangpol tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan

kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Kantor Kesbangpol untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

## **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Kantor Kesbangpol melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.

2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Kantor Kesbangpol, dimana bersama dengan Kepala Kantor Kesbangpol, Kepala Kantor Kesbangpol melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kantor Kesbangpol dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Kantor Kesbangpol dilakukan melalui Renja Kantor Kesbangpol setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Kantor Kesbangpol setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kantor Kesbangpol tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kantor Kesbangpol dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Kantor Kesbangpol diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bulukumba dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.